



Analisis Potensi Dan Kendala Pendirian BUMDes di Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Analysis of the Potential and Obstacles to Establishing BUMDes in the Guntur Subdistrict, Demak Regency

Nugroho Tulus Rahayu*, Ariyani Indriastuti

STIE Semarang, Semarang

Corresponding author: tulus @stiesemarang.ac.id*

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Di wilayah kecamatan Guntur kabupaten Demak sudah berdiri 2 BUMDes yaitu BUMDes Sidorukun di desa Sidokumpul dan BUMDes Sumberlancar di desa Bakalrejo. Delapan belas desa lainnya belum memiliki BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inisiatif pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes, mengetahui potensi apa saja yang dimiliki desa untuk mendirikan BUMDes, mengetahui kendala dalam mendirikan BUMDes, mengetahui profil dan peran BUMDes di wilayah kecamatan Guntur terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Populasi penelitian ini adalah pemerintah desa yang berada di wilayah kecamatan Guntur yang berjumlah 20 desa dan BUMDes Sidorukun dan BUMDes Sumber Lancar. Metode yang digunakan adalah metode sensus. Data diperoleh dengan cara wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inisiatif pemerintah desa di wilayah kecamatan Guntur kabupaten Demak dalam mendirikan BUMDes masih rendah. Potensi yang bisa dikelola oleh BUMDes antara lain potensi di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan air bersih. Kendala dalam mendirikan BUMDes bersumber pada persepsi dan pemahaman pemerintah desa tentang BUMDes yang masih rendah. BUMDes Sidorukun sudah mampu memperoleh laba dan bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah desa. Sedangkan BUMDes Sumberlancar belum bisa memperoleh laba sehingga belum bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah desanya.

Kata kunci: Potensi, Kendala, Pendirian, BUMDes.

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises or BUMDes are pillars of economic activity in the village, which strengthens the village economy. BUMDes is formed by the village government based on the needs and potential of the village. In the Guntur subdistrict, Demak Regency, 2 BUMDes are established, namely Sidorukun BUMDes in Sidokumpul village and Sumberlancar BUMDes in Bakalrejo village. Eighteen other villages do not yet have BUMDes. The purpose of this study was to determine the initiative of the village government in establishing BUMDes, knowing the potential of the village to establish BUMDes, knowing the constraints in establishing BUMDes, knowing the profile and role of BUMDes in the Guntur subdistrict area towards increasing village original income. The population of this study is the village government in the Guntur subdistrict, which amounts to 20 villages. The method used is the census method. Data obtained by interviewing 20 village governments. The analytical method used is descriptive analysis. The results of this study found that the initiative of the village government in the Guntur sub-district of Demak district in establishing BUMDes was still low. Potentials that can be managed by BUMDes include potential in agriculture, animal husbandry, trade, and clean water. Constraints in establishing BUMDes stem from village government perceptions and understanding of BUMDes which are still low. The Sidorukun BUMDes has been able to make a profit and can contribute income to the village government. While BUMDes Sumberlancar has not been able to make a profit so it has not been able to provide additional revenue for the village government.

Keywords: Potential, Constraints, Establishment, BUMDes.



PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 90 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan
- c. memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dengan demikian keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes sesungguhnya merupakan suatu kebutuhan yang semestinya ada di setiap desa. Pada tahun 2018 Pemerintah kecamatan Guntur baru memiliki dua BUMDes, masih ada 18 desa yang belum memiliki BUMDes. Dua BUMDes tersebut adalah BUMDes Sidorukun yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan BUMDes Sumberlancar yang bergerak dibidang persewaan alat-alat pertanian dan kegiatan simpan pinjam kegiatan ekonomi produktif.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui inisiatif pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes
2. Mengetahui potensi yang dimiliki desa untuk mendirikan BUMDes
3. Mengetahui kendala dalam mendirikan BUMDes
4. Mengetahui profil dan peran BUMDes di wilayah kecamatan Guntur terhadap peningkatan pendapatan pemerintah desa

Kajian teoritis

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014).

B. Penelitian terdahulu tentang BUMDes

Beberapa penelitian terdahulu tentang badan usaha milik desa adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Denok Kurniasih (2017) menemukan hal-hal berikut :
 - a. Dari 301 desa di wilayah ini baru 2 BUMDes yang ada, dalam perencanaan dan persiapan ada 43 desa dan sisanya belum memiliki BUMDes,
 - b. Kinerja BUMdes masih lemah,
 - c. Lemahnya kinerja lebih disebabkan oleh dominasi peran perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes,
 - d. Dominasi perangkat desa tercermin dari ambiguitas peran dan konflik kepentingan sehingga prinsip privatisasi dalam pengelolaan lembaga ini tidak berjalan secara normal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Susilo, Nurul Purnamasari dari Yayasan Pambudi (2016), menemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sumber air yang cukup di Desa Ponjong belum dimanfaatkan secara optimal kecuali untuk usaha pertanian demikian juga desa Bleberan yang memiliki empat (4) sumber mata air
 - b. BUMDes di dua desa tersebut belum terkelola secara optimal



- c. Pemerintah desa memiliki anggapan bahwa BUMDes adalah milik Pemerintah Desa sehingga perangkat desa (kepala desa) berhak untuk menunjuk personal pengelola BUMDes
 - d. Komunikasi antara pengelola dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Benny Ferdianto (2016) menemukan bahwa:
- a. Diketahui bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana memberikan kontribusi yang nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh. Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran *online* terjadi peningkatan pendapatan asli tiyuh.
 - b. Mengalami kendala yaitu kemampuan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes masih rendah
4. Penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo (2014) menemukan bahwa:
- a. BUMDes menjadi sumber dana baru bagi pendapatan asli desa
 - b. BUMDes membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan menyewakan kios pasar dan pemberian pinjaman modal usaha
5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza M Zulkarnaen (2016) menemukan bahwa:
- a. Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan
 - b. Pemerintah desa dan lembaga desa yang ada di desa parakan salam dan salam jaya segera membentuk BUMDes
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Iksan (2018), menyimpulkan bahwa:
- a. BUMDes Lerep sudah dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan,
 - b. Hambatan dalam pengembangan BUMdes adalah sulit mencari karyawan karena gaji yang diberikan kurang memadai
7. Penelitian yang dilakukan oleh Jeli Koso (2018), menyatakan bahwa:
- a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Amulan Watulaney, Distrik Lembean Timur, Minahasa Kabupaten belum dilakukan dengan baik.
 - b. Tahap perencanaan belum dilaksanakan program yang telah dalam perencanaan dan implementasi manajer belum maksimal karena kurangnya organisasi penata layanan menjadi penyebab tidak terlaksananya manajemen yang sempurna

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung pada pemerintah desa di kecamatan Guntur dan pengelola BUMDes. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa di wilayah kecamatan Guntur, pengelola BUMDes di desa Sidokumpul dan desa Bakalrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah:

- a. Inisiatif pemerintah desa
Pemerintah desa di wilayah kecamatan Guntur Kabupaten Demak memiliki inisiatif yang rendah dalam upaya pendirian BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa yang dibiayai dengan menggunakan anggaran desa. Pemerintah desa lebih memprioritaskan pada kegiatan pembangunan fisik infrastruktur



daripada kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah desa di wilayah kecamatan Guntur Kabupaten Demak belum pernah melakukan kegiatan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang BUMDes. Kegiatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang BUMDes ini bisa dilakukan dengan cara mengunjungi atau studi banding ke BUMDes di daerah lain yang sudah berkembang dan maju atau dengan melakukan kegiatan pelatihan yang mendorong untuk berdirinya BUMDes.

b. Potensi desa

Potensi yang dimiliki oleh desa-desa di kecamatan Guntur antara lain:

1. Lahan pertanian yang luas dan subur
2. Hasil pertanian melimpah lebih dari 5 ton per hektare per panen
3. Tersedianya pakan alami untuk peternakan kambing dan sapi
4. Memiliki sumber air artesis untuk memenuhi keperluan rumah tangga
5. Akses jalan yang sudah dibetonisasi di setiap jalan desa dan jalan kampung
6. Jumlah penduduk dan SDM berpendidikan tinggi yang cukup memadai
7. Potensi perdagangan (pasar desa)

c. Analisis situasi

Di wilayah kecamatan Guntur desa yang sudah memiliki BUMDES ada 2 yaitu desa Bakalrejo dan desa Sidokumpul. Ada 4 desa yang sedang dalam proses pendirian BUMDES yaitu desa Bogosari, desa Wonorejo, desa Gaji dan desa Tangkis sedangkan 14 desa yang lainnya belum bergerak untuk mendirikan BUMDES. Dilihat dari situasi desa yang ada adalah sebagai berikut:

1. Desa yang sudah belum memiliki BUMDES

Desa-desa ini memiliki sumber pendapatan berasal dari sewa tanah bondo desa yang disewakan kepada masyarakat setiap tahunnya dan dari bantuan hibah pemerintah pusat dalam bentuk dana desa, alokasi dana desa, dana bantuan pemerintah provinsi dan dana bantuan dari pemerintah kabupaten. Desa-desa ini masih mengandalkan suplai dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dilihat dari sumber pendapatan tersebut terlihat bahwa desa-desa ini belum memiliki pandangan untuk menjadi desa mandiri yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatannya sendiri diluar suplai dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Padahal sesungguhnya desa-desa ini memiliki banyak potensi yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengolah dan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki ini pemerintah desa sangat perlu untuk mendirikan BUMDES yang mana akan melakukan kegiatan usaha ekonomi di desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan menghasilkan pendapatan dari kegiatan usahanya tersebut. Sebenarnya peluang untuk mendirikan BUMDES sangatlah besar karena tersedia potensi-potensi yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, akan tetapi hal ini belum dilakukan karena pemerintah desa memiliki persepsi atau pemahaman yang mengakibatkan BUMDES menjadi hal belum perlu untuk didirikan.

2. Desa yang sudah memiliki BUMDES

Dua desa yang memiliki BUMDes yaitu desa Bakalrejo dan desa Sidokumpul melakukan kegiatan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desanya. BUMDES desa sidokumpul melakukan usaha pengadaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat. Akan tetapi kegiatan usaha ini belum



maksimal karena masih ada warga yang belum tercukupi kebutuhan air untuk keperluan hidup sehari-hari dan airnya sering tidak mengalir dengan lancar. Oleh karena itu usaha pemenuhan air bersih ini perlu untuk ditingkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya. Walaupun demikian BUMDES desa sidokumpul ini sudah bisa memperoleh laba usaha dan memberikan pendapatan bagi pemerintah desa Sidokumpul. Selain pemenuhan air bersih sebenarnya masih banyak usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDES ini yaitu antara lain pemenuhan bibit pertanian, pengadaan pupuk untuk petani, pengolahan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, usaha peternakan, dan pengelolaan sampah.

BUMDES desa bakalrejo melakukan kegiatan usaha yaitu menyewakan traktor untuk pengolahan lahan pertanian dan kegiatan usaha simpan pinjam untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Akan tetapi usaha BUMDES di desa Bakalrejo tidak berjalan dengan baik, beberapa traktor yang disewakan kepada para petani itu hilang ditengah sawah saat pengemudi traktornya sudah pulang. Usaha simpan pinjam untuk usaha ekonomi produktif juga mengalami kemacetan. Sehingga BUMDES bakalrejo ini belum bisa menghasilkan laba, karena kegiatan usahanya sudah tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami banyak kerugian. Hal ini terjadi karena:

- a. Sumber daya manusia pengelola BUMDes belum memiliki kemampuan yang cukup
 - b. BUMDES belum memiliki standar pengelolaan yang baik
 - c. Belum adanya pengawasan dan pengendalian yang baik, untuk memastikan kegiatan usaha BUMDES dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Kendala pendirian BUMDes
- Sebenarnya proses pendirian BUMDes tidaklah sulit dan rumit akan tetapi pemerintah desa belum tergerak untuk mendirikan BUMDes karena ada beberapa hal yang menjadi kendala terbentuknya BUMDes. Kendala tersebut bersumber dari beberapa hal yaitu:
1. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang BUMDes sehingga belum bisa melihat manfaat yang bisa diperoleh dari adanya BUMDes
 2. Kurangnya ide-ide kreatif pada pemerintah desa untuk mengolah dan mengembangkan potensi desa yang dimiliki menjadi kegiatan usaha yang bernilai ekonomis
 3. Pemerintah desa kurang terbuka terhadap partisipasi seluruh warga masyarakat untuk pembangunan ekonomi desa sehingga pemerintah desa belum menemukan sumber daya manusia yang dirasa mampu untuk mengelola BUMDes dengan baik.
 4. Pemerintah desa cenderung lebih memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daripada untuk kegiatan yang bersifat pembangunan ekonomi.
- e. Profil dan peran BUMDes
- a. BUMDes Sidorukun di desa Sidokumpul sudah berjalan beberapa tahun dan sudah bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah desa yaitu memberikan pemasukan sebesar Rp. 25.000.000,- setiap tahunnya. Pengelolaan BUMDes desa sidokumpul ini harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi agar mampu memberikan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat dengan lebih baik yaitu kebutuhan air seluruh warga bisa terpenuhi dengan baik dan lancar. Didesa Sidokumpul ini terdapat 3 sentra industri tempe yang setiap harinya membutuhkan air bersih untuk kegiatan produksinya yang dipenuhi dari air bersih yang disediakan oleh BUMDes,



sehingga usaha BUMDes desa Sidokumpul ini ikut mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi warga masyarakat.

- b. BUMDes sumber lancar di desa Bakalrejo memiliki pengelolaan usaha yang tidak baik. Usaha menyewakan traktor untuk pengolahan lahan pertanian tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal, beberapa mesin traktor yang disewakan untuk mengolah lahan pertanian rusak dan hilang. Usaha simpan pinjam ekonomi produktif mengalami kemacetan, banyak peminjam yang tidak mau membayar pinjaman sesuai dengan kewajibannya dengan baik sehingga dana pinjaman berhenti berputar. BUMDes Sumber Lancar belum bisa memperoleh keuntungan dan belum bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah desa Bakalrejo.

f. Peningkatan ekonomi pedesaan

Dalam kegiatan usahanya BUMDes desa Sidokumpul sudah mampu memperoleh keuntungan dan dari keuntungan itu sebagian dialokasikan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah desa Sidokumpul. Pada tahun 2018 BUMDes ini memberikan sumbangan pendapatan untuk pemerintah desa sebesar Rp. 25.000.000-. Dengan kontribusinya pada pendapatan pemerintah desa BUMDes ini telah ikut berperan dalam upaya pembangunan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

BUMDes ini ikut berperan menghidupkan usaha masyarakat salah satunya kegiatan produksi tempe. Di desa Sidokumpul terdapat 3 (tiga) industri tempe yang terpenuhi kebutuhan air bersihnya oleh kegiatan usaha BUMDes ini. Industri tempe ini menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat. Warga desa yang bekerja di industri tempe ini telah mendapatkan penghasilan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

KESIMPULAN

1. Inisiatif pemerintah desa di wilayah kecamatan Guntur kabupaten Demak dalam mendirikan BUMDes masih rendah
2. Desa-desa di wilayah kecamatan Guntur kabupaten Demak memiliki banyak potensi yang bisa dikelola melalui BUMDes menjadi kegiatan usaha yang bernilai ekonomis
3. Kendala pendirian BUMDes bersumber pada rendahnya pemahaman pemerintah desa tentang BUMDes dan persepsi yang tidak kondusif terhadap pendirian BUMDes
4. BUMDes Sidorukun di desa Sidokumpul sudah mampu memperoleh laba dan bisa memberikan masukan pendapatan bagi pemerintah desa.
5. BUMDes Maju Lancar di desa Bakalrejo belum bisa memperoleh laba karena kegiatan usaha tidak dikelola dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
Kurniasih, Denok, 2017. Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas. <https://jurnalscienceindonesia.com/wp-content/uploads/2017/08/Jurnal-No.-1>
Susilo. Budi, Purnamasari, Nurul (2016). Potensi dan permasalahan yang dihadapi Badan usaha milik desa (BUMDesa) (telaah kajian potensi dan permasalahan pada BUMDesa ‘Hanyukupi’ Ponjong dan BUMDesa ‘Sejahtera’ Bleberan di Kabupaten Gunungkidul). <http://www.keuangandesas.com/wp-content/uploads/2016/05>



- Ferdianto, Benny. 2016. Eksistensi badan usaha milik desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. <http://digilib.unila.ac.id/21324/3>
- Ramadana, Berlian, Coristya, dkk. 2014. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Universitas Brawijaya Malang. <https://media.neliti.com/media/publications/75712>
- Zulkarnaen, M, Reza. (2016) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) PONDOK SALAM KABUPATEN PURWAKARTA <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/11430/5226>
- Iksan, Nur, Ahmad. 2018 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/.../20172>
- Koso, Jeli, et.all, 2018. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/.../19203/1876>

